



**PENGARUH PEMAHAMAN PERANGKAT DESA DAN PERAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mem peroleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Disusun Oleh:**

**MASRIYAH**

**NPM. 21901082058**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

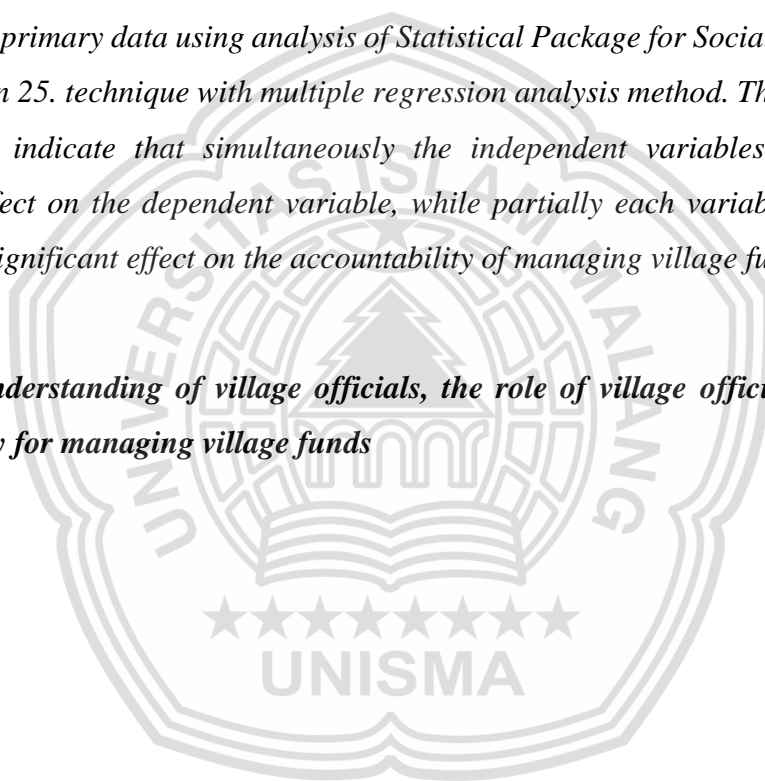
Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data teknik pengumpulan menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 orang responden. Tempat penelitian ini yaitu perangkat desa di Desa Pudakittimur, Desa PudakitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Pengolahan data primer menggunakan analisis Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25. teknik dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci : pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa**

## ABTRACT

*The purpose of this research is to analyze and discuss the effect of understanding village officials and the role of village officials on the accountability of village fund management. This research is a quantitative research with technical data collection using a questionnaire. The sample in this study amounted to 61 respondents. The location of this research was village officials in Pudukittimur Village, Pudukit Barat Village, and Suwari Village, Sangkapura sub-district, Gresik Regency. The sampling technique used is purposive sampling method. Processing of primary data using analysis of Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25. technique with multiple regression analysis method. The results of this study indicate that simultaneously the independent variables have a significant effect on the dependent variable, while partially each variable has a positive and significant effect on the accountability of managing village funds.*

***Keywords: understanding of village officials, the role of village officials, and accountability for managing village funds***



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan karena selama ini Desa kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah Pusat sehingga terdapat ketimpangan yang jelas antara masyarakat Desa dengan masyarakat kota. Pemerintah sadar jika desa terus menerus tidak mendapat perhatian maka desa akan semakin tertinggal dan hal itu merupakan hal yang bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara bertahap pemerintah mulai mengucurkan dana desa karena tanpa adanya aktivitas pendanaan maka Desa akan kesulitan dalam menjalankan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik.

Dana Desa hadir sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana Desa didefinisikan sebagai dana yang diperuntukkan untuk mendanai segala kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan, menanggung kegiatan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang dianggarkan dari APBN setiap

tahunnya merupakan salah satu sumber pendapatan desa di samping pendapatan yang diperoleh desa lainnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. (PERMENDAGRI No. 611, 2018). Mengelola keuangan Desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintah Desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi tuntutan yang perlu diprioritaskan dalam sektor publik oleh pemerintah desa karena menyangkut kewajiban pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Akuntabilitas dalam laporan keuangan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai akuntabilitas keuangan saja, namun juga akuntabilitas *value for money*, manajerial, hukum, dan politik. Informasi atas segala aktivitas maupun kinerja finansial pemerintah harus diungkapkan melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Aparat Desa sebagai pengurus yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal, bertanggung jawab atas proses pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana desa (Hardiningsih et al., 2020).

Pada saat ini tingkat pemahaman aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa tergolong kurang baik yang menyebabkan penghambatan dalam menyalurkan dana desa. Pemahaman merupakan cara, proses, dan perbuatan dalam memahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2015). Setiawan dan Yuliani (2017) mengatakan perlu adanya pendampingan kepada aparatur Desa dalam memahami pengelolaan dana Desa dengan harapan agar dapat membuat Desa menjadi lebih bertanggung jawab dan pengelolaan dana Desa dapat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan Desa adalah tingkat pendidikan pemerintah desa, kualitas pelatihan yang diterima/diikuti pemerintah desa dan penguasaan mendalam tentang pemerintah desa mengenai tanggung jawab atau pekerjaannya.

Peran perangkat Desa merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Indonesia. Peran Perangkat desa sebenarnya membantu kepala Desa dalam mengelola dana Desa. Hal ini akan menjadi stimulan bagi perangkat desa untuk terus berperan dalam setiap kegiatan desa demi terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Indrianasari, 2017). Sehingga masyarakat berharap agar perangkat Desa berperan dalam akuntabilitas dana desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa seperti yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 yakni: Transparan, akuntabel, dan partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Tahun 2021 Desa Pudukittimur Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 571.076.000,00 , desa Pudukit Barat Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 506.048.000,00 dan desa Suwari Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 581.908.000,00 (Peraturan Bupati Gresik No 56 tahun 2021). Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap

pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa yang bertanggung jawab sehingga dapat dikelola dengan baik dan digunakan dengan tepat, agar realisasi dana desa dapat tercapai dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut. Yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purba (2020) menyatakan bahwa dalam penelitiannya Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di desa Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini merupakan replikasi pada penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan didesa Pudakittimur, desa Pudakit barat, desa suwari Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Purba (2020) di desa Pinangsoro Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dari itu penelitian mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?
2. Apakah pemahaman perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
3. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Bidang Ilmu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi dalam pengembangan bidang ilmu akuntansi terutama berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan peneliti selanjutnya, yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perangkat Desa dalam membuat akuntabilitas untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pengelolaan keuangan tingkat desa.

###### b. Bagi Perangkat Desa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perangkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui faktor pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa.

c. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perangkat desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintah, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan karena selama ini Desa kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah Pusat sehingga terdapat ketimpangan yang jelas antara masyarakat Desa dengan masyarakat kota. Pemerintah sadar jika desa terus menerus tidak mendapat perhatian maka desa akan semakin tertinggal dan hal itu merupakan hal yang bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara bertahap pemerintah mulai mengucurkan dana desa karena tanpa adanya aktivitas pendanaan maka Desa akan kesulitan dalam menjalankan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik.

Dana Desa hadir sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana Desa didefinisikan sebagai dana yang diperuntukkan untuk mendanai segala kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan, menanggung kegiatan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang dianggarkan dari APBN setiap

tahunnya merupakan salah satu sumber pendapatan desa di samping pendapatan yang diperoleh desa lainnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. (PERMENDAGRI No. 611, 2018). Mengelola keuangan Desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintah Desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi tuntutan yang perlu diprioritaskan dalam sektor publik oleh pemerintah desa karena menyangkut kewajiban pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Akuntabilitas dalam laporan keuangan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai akuntabilitas keuangan saja, namun juga akuntabilitas *value for money*, manajerial, hukum, dan politik. Informasi atas segala aktivitas maupun kinerja finansial pemerintah harus diungkapkan melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Aparat Desa sebagai pengurus yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal, bertanggung jawab atas proses pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana desa (Hardiningsih et al., 2020).

Pada saat ini tingkat pemahaman aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa tergolong kurang baik yang menyebabkan penghambatan dalam menyalurkan dana desa. Pemahaman merupakan cara, proses, dan perbuatan dalam memahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2015). Setiawan dan Yuliani (2017) mengatakan perlu adanya pendampingan kepada aparatur Desa dalam memahami pengelolaan dana Desa dengan harapan agar dapat membuat Desa menjadi lebih bertanggung jawab dan pengelolaan dana Desa dapat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan Desa adalah tingkat pendidikan pemerintah desa, kualitas pelatihan yang diterima/diikuti pemerintah desa dan penguasaan mendalam tentang pemerintah desa mengenai tanggung jawab atau pekerjaannya.

Peran perangkat Desa merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Indonesia. Peran Perangkat desa sebenarnya membantu kepala Desa dalam mengelola dana Desa. Hal ini akan menjadi stimulan bagi perangkat desa untuk terus berperan dalam setiap kegiatan desa demi terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Indrianasari, 2017). Sehingga masyarakat berharap agar perangkat Desa berperan dalam akuntabilitas dana desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa seperti yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 yakni: Transparan, akuntabel, dan partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Tahun 2021 Desa Pudukittimur Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 571.076.000,00 , desa Pudukit Barat Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 506.048.000,00 dan desa Suwari Kecamatan Sangkapura mendapatkan dana sebesar Rp. 581.908.000,00 (Peraturan Bupati Gresik No 56 tahun 2021). Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap

pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa yang bertanggung jawab sehingga dapat dikelola dengan baik dan digunakan dengan tepat, agar realisasi dana desa dapat tercapai dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut. Yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purba (2020) menyatakan bahwa dalam penelitiannya Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di desa Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini merupakan replikasi pada penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan didesa Pudakittimur, desa Pudakit barat, desa suwari Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Purba (2020) di desa Pinangsoro Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dari itu penelitian mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?
2. Apakah pemahaman perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
3. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Bidang Ilmu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi dalam pengembangan bidang ilmu akuntansi terutama berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan peneliti selanjutnya, yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perangkat Desa dalam membuat akuntabilitas untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pengelolaan keuangan tingkat desa.

###### b. Bagi Perangkat Desa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perangkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui faktor pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa.

###### c. Bagi Pemerintah Desa



Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perangkat desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintah, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Setiawan dan Yuliani (2017) Melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa“. Jenis serta asal data yang digunakan adalah menggunakan data subjek dengan menggunakan koesioner yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Mungkid yang mendapatkan dana desa. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa, Sedangkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Rangkuti dan Novasari (2019) melakukan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati II Kecamatan Pembaungan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Probolitas sebesar 0,025 yang lebihkecil dari 0,05 ( $0,025 < 0,05$ ).

Purba (2020) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Elliya et al (2021) melakukan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Pakalongan dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”. Jenis metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Desa Pakalongan dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Rahmadhani dan Syahdan (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yakni kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu perangkat Desa. Sumber data yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi, Kepala Urusan Umum. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, penerapan alokasi dana

desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Ningsih et al (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Pada 8 Desa di Kecamatan Amahi, Kabupaten Maluku Tengah)”. Populasi penelitian tersebut Kecamatan Amahi Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data adalah kuesioner dimana terdapat 32 responden. Analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa secara variabel peran perangkat desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 *Grand Theory Stewardship*

*Stewardship theory* yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* lebih terfokus pada fasilitasi dan pemberdayaan dari pada melakukan monitor dan kontrol. Teori tersebut menggambarkan Teori yang mempunyai dasar sosiologi dan psikologi, di mana para eksekutif bertindak sebagai *steward*. Para eksekutif sebagai *steward* tersebut termotivasi untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *principals*. Perilaku *steward* juga tidak akan meninggalkan

organisasinya, dikarenakan *steward* selalu mengupayakan agar tujuan organisasi dapat terwujud.

### 2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Akuntabilitas sangat di butuhkan untuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Akuntabilitas sendiri menjadi sangat sensitif karena menyangkut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

Hoesada (2014:2) Desa dan Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, perbedaannya hanya pada pelaksanaan hak asal-usul, yang terpenting menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan atas dasar susunan asli, pengaturan adat-istiadat atau Wilayah adat, perlindungan nilai-nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa adat pada wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diutamakan penyelesaian melalui musyawarah, diadakan konferensi perdamaian di pengadilan desa adat yang ditentukan dengan undang-undang, berdasarkan

hukum adat Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berlaku bagi desa adat dan perkembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Selain itu Peraturan Desa Adat berlaku terhadap hukum adat dan norma adat desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau sebutan lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang meliputi:

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa
2. Komponen pembantu kepala desa meliputi:
  - a. Sekretariat desa yaitu staf yang diketuai oleh sekretaris desa,
  - b. Pelaksana teknis yaitu tenaga pembantu kepala desa yang melakukan urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain
  - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di bidang pekerjaannya, seperti pengairan, urusan agama, dll.

### **1. Akuntabilitas**

Setiyono (2014:193) Akuntabilitas merupakan asas yang menekankan bahwa segala tindakan, kebijakan dan kegiatan lembaga publik selalu dapat dimaknai dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada fasilitas, tidak ada anggaran, tidak ada kewenangan untuk sesuatu yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Waluyo (2007:191) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan berkala yang memuaskan atas tindakan atau kelalaian otoritas atau wewenang yang dimiliki.

Mahmudi (2015:9) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, dan harus diikuti untuk memberikan kapasitas eksekutif, fleksibilitas, dan otoritas.

Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Mahmudi (2015:9-11) bahwa akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik tersebut antara lain:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah kewajiban lembaga publik untuk bertindak jujur dalam pekerjaan mereka dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana publik harus tepat dan sah.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola organisasi mereka secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajemen juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Ketidakefisienan organisasi publik menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan dan tidak boleh ditanggung oleh klien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program melibatkan pertimbangan apakah tujuan yang dinyatakan dapat dicapai dan apakah program alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah dipertimbangkan. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi harus merupakan proyek berkualitas tinggi yang mendukung strategi dan mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik tentang kebijakan yang diambil. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan pertimbangkan dampak masa depan untuk ditentukan. Ketika merumuskan kebijakan, harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan itu, Mengapa kebijakan diadopsi Siapa sasarannya, pemangku kepentingan Siapa (*stakeholder*) yang akan terpengaruh dan diuntungkan darinya Dampak (negatif) dari kebijakan tersebut.

e. Akuntabilitas Finansial



Akuntabilitas Finansial adalah tanggung jawab lembaga publik untuk menyimpan, menggunakan dana publik secara efisien dan efektif tanpa pemborosan, kehilangan atau korupsi. Tanggung jawab keuangan menekankan anggaran dan ukuran keuangan. Akuntabilitas finansial penting karena manajemen keuangan publik akan menjadi pusat perhatian masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018 :21) Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu :

- a. *Horizontal Accountability* (Akuntabilitas Horizontal) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas.
- b. *Vertical Accountability* (Akuntabilitas Vertikal) yaitu proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR, pertanggungjawaban dinas kepada pemerintah daerah

## 2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Sebagai sumber pendapatan desa, Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam kerangka pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Transparan

Mardiasmo (2004:30) transparansi adalah pemerintah secara terbuka memberikan informasi kegiatan pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan lainnya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

b. Akuntabel

Menurut Mardiasmo (2004-20) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang yang memiliki hak sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang.

### 3. Pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Adapun mekanismenya Berdasarkan Permendagri No. 611 Tahun 2018 yaitu :

1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa setelah itu disampaikan kepada kepala desa.

2. Kepala desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk Pembahasan lebih lanjut.
3. Rencana peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama ,kesepakatan tersebutpaling lama bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rencana peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat kemudian di evaluasi paling lambat tiga hari sejak disepakati. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentan APBDesa kepada Camat.
5. Evaluasi Rencana APBDesa ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja sejak kesepakatan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi selama 20 hari waktu kerja maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Penyempurnaan yang dilakukan Kepala Desa paling lama 7 hari kerja yang terhitung sejak diterima hasil evaluasi tersebut.
7. Jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan tersebut.
8. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Oprasional

penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh kepala desa saja.

9. Pelaksanaan Peraturan Desa yang diberhentikan oleh kepala desa paling lama 7 hari kerja sesudah pembatalan yang selanjutnya kepala Desa dan BPD mencabut peraturan desa.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Pasal 43 Permendagri No. 611 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yakni:

1. Pemerintah desa tidak diperbolehkan memungut sebagai pendapatan desa, kecuali Ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan sejumlah uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu Untuk memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah desa.

Dalam hal pelaksanaan kekuasaan di tingkat desa, seluruh penerimaan dan pengeluaran di tingkat desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, peraturan harus ditetapkan oleh Bupati/Dewan Kota. Semua pendapatan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:29).

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang dikhususkan untuk Bendahara Desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, dan buku bank dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan diharuskan menetapkan bendahara desa. Ditetapkannya bendahara desa dilakukan sebelum sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Hamzah (2015), bendahara merupakan perangkat desa yang di tunjuk oleh kepala desa, untuk menerima, disimpan, menyetor, menatausahakan, mempertanggung jawabkan keuangan desa oleh kepala desa dalam rangka penyelenggaraan APBDesa.

d. Pelaporan

Berdasarkan Pasal 68 Permendagri No. 611 2018, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Menyerahkan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota dalam bentuk:
  - a. Laporan realisasi APBDes pada semester pertama, sekurang-kurangnya disampaikan pada akhir bulan juli tahun

berjalan. Laporan semester akhir tahun, diserahkan pada akhir tahun.

- b. Menyerahkan laporan tahunan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Mengemukakan laporan penyelenggara pemerintah desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota pada akhir masa jabatan.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggara pemerintah desa dengan tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada BPD.
- e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 611 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat. Laporan pelaksanaan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa yang terlampir:
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan.
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
  - c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seperti yang dimaksud di atas paling lambat sesudah akhir tahun anggaran. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
  - a. Direncanakannya pengelolaan keuangan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan didalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan dan dievaluasi dengan cara terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
  - b. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum dan administrasi.
  - c. Masyarakat memiliki akses informasi keuangan desa secara transparan.
  - d. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip efisiensi, terarah dan pengendalian yang tinggi.

### 2.2.2 Pemahaman Perangkat Desa

Menurut Sudaryono (2012:44) Pemahaman adalah kemampuan individu untuk menangkap makna dari apa yang telah dipelajarinya dengan mendeskripsikan apa yang telah dibacanya atau mentransformasikan data yang ada ke dalam bentuk lain.

Menurut Sudijono (2009:50) Dikatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Menurut teori keagenan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, Kepala Desa bertanggung jawab

sebagai pengambil keputusan, dan Perangkat Desa bertanggungjawab sebagai agen dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Kepala Desa dan aparatnya harus memiliki pemahaman tentang akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang mendalam kepada Kepala Desa dan aparat Desa. Pemahaman yang dimiliki perangkat Desa juga memberikan harapan agar dapat membuat desa menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Desa.

### 2.2.3 Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Definisi Peran menurut Soekanto (2002:243) adalah suatu posisi, kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam aspek masyarakat yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Ndraha (1991:152), Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa,



3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Widjaja (2002:22) peran perangkat desa memiliki kedudukan yakni:

1. Unsur Staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggung jawab kepada kepala desa.

a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai:

- Unsur staf sebagai orang kedua
- Memimpin sekretariat desa.

b. Fungsi Sekretariat Desa:

- Administrasi umum
- Kegiatan keuangan desa dan pemerintah
- Kegiatan dalam kearsipan
- Melaksanakan fungsi kepala desa berhalangan

c. Tugas sekretaris desa:

- Memberikan pelayanan staf
- Melaksanakan administrasi desa

2. Unsur pelaksanaan teknik, yakni bertanggung jawab pada Sekretaris Desa:

a. Tugas Kepala urusan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

b. Fungsi Kepala urusan yaitu:

- Melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya
- Melakukan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

3. Unsur wilayah Desa, merupakan Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam hal membantu Kepala Desa dalam urusan wilayah bagian Desa:
  - a. Kedudukan sebagai kepala dusun yakni melakukan tugas di wilayah kerjanya.
  - b. Fungsi Kepala Dusun:
    - Melaksanakan kebijakan Kepala Desa
    - Melaksanakan kegiatan pemerintah, ke masyarakat, pembangunan
    - Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.

Menurut soekanto (2002:243), jenis-jenis peran dibagi menjadi 3 sebagai berikut:

1. Peranan normatif

Merupakan peranan yang dilakukan lembaga ataupun seseorang yang didasarkan dengan norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan ideal

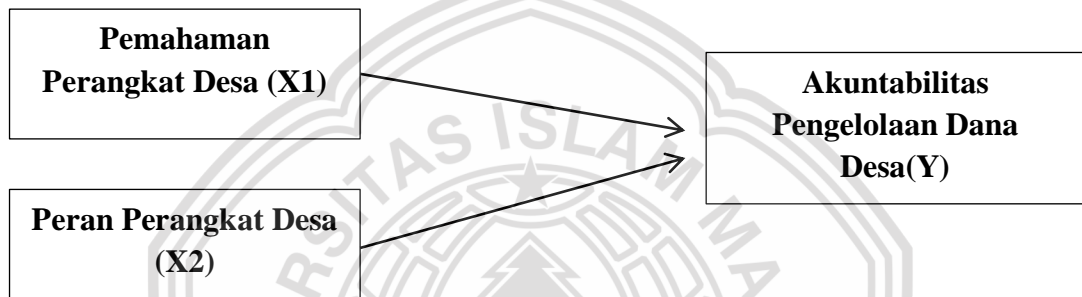
Merupakan peranan yang dilakukan lembaga ataupun seseorang yang didasarkan dengan nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

3. Peranan faktual

Merupakan peranan yang dilakukan lembaga ataupun seseorang yang didasarkan kenyataan secara pasti di lapangan maupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual untuk memudahkan pemahaman yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Perangkat Desa, Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang dapat diajukan dalam penelitian ini yakni:

$H_1$  = Terdapat pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa..

$H_{1a}$  = Terdapat pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H<sub>1b</sub> = Terdapat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:48) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka dan menggunakan perhitungan statistik, dan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal langsung dari pihak pertama, kuisisioner atau informasi yang disusun secara kualitatif dengan menggunakan kuesioner.

Berdasarkan jenis hubungan variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Menurut (Azwar, 2010:8-9) penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain dalam hal koefisien korelasi. Dari penelitian ini dapat menganalisis pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perangkat desa di Desa Pudakittimur, Desa PudakitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023.

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:58). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Desa Pudakittimur, Desa Pudakit Barat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2019:58). Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 61 responden.

Menurut Sugiyono (2019:81), pengukuran sampel adalah suatu langkah dalam menentukan ukuran sampel, suatu ukuran yang diambil pada saat melakukan penelitian terhadap suatu objek. Oleh karena itu, teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan besar sampel dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus agar data hasil penelitian yang dilakukan representatif (Sugiyono, 2018:138). Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi dan kepala dusun yang merupakan pihak yang terlibat dalam partisipasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- b. Ketua BPD beserta anggotanya.

### 3.3 Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2018:69) variabel independen merupakan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pemahaman perangkat desa ( $X_1$ ), dan peran perangkat desa ( $X_2$ ).

#### 3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2018:69) Variabel dependen merupakan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019: 68) yaitu suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

### 3.4.1 Pemahaman Perangkat Desa (X1)

Pemahaman perangkat desa adalah kemampuan individu untuk menangkap makna dari apa yang telah dipelajarinya dengan mendeskripsikan apa yang telah dibacanya atau mentransformasikan data yang ada ke dalam bentuk lain. Menurut Selvia (2020) indikator pemahaman perangkat desa meliputi:

1. Pelatihan teknis yang telah diikuti oleh aparat desa.
2. Penguasaan mendalam aparat desa mengenai tanggung jawab atau pekerjaannya.

Dari indikator tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert* 5 point yaitu, 1 skor = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 skor = Tidak setuju (TS), 3 skor = Netral (N), 4 skor = Setuju (S), 5 skor = Sangat Setuju (SS).

### 3.4.2 Peran Perangkat Desa (X2)

Menurut Widjaja (2002: 22) yang dimaksud peran perangkat desa yaitu unsur staf, unsur pelaksana teknis, unsur wilayah. Menurut elliyana (2021) Indikator dalam peran perangkat Desa yaitu:

1. Keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan alokasi dana desa.
2. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran biaya desa.

Dari indikator tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert* 5 point yaitu, 1 skor = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 skor = Tidak set uju (TS), 3 skor = Netral (N), 4 skor = Setuju (S), 5 skor = Sangat Setuju (SS).



### 3.4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dena Desa (Y)

Menurut Elliyana et al (2021) akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan organisasi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Indikator dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa yaitu :

1. Perencanaan rincian anggaran biaya
2. Pelaksanaan dalam anggaran biaya
3. Penatausahaan rencana anggaran biaya
4. Pelaporan dokumentasi anggaran biaya kepada Bupati/Walikota
5. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes anggaran biaya

Dari indikator tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert* 5 point yaitu, 1 skor = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 skor = Tidak setuju (TS), 3 skor = Netral (N), 4 skor = Setuju (S), 5 skor = Sangat Setuju (SS).

## 3.5 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

### 3.5.1 Sumber Data

Menurut Sugiono (2018: 137) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer tersebut diperoleh langsung dari perangkat desa di Desa Pudukittiur, Desa Pudukit Barat, Desa Suwari Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang menjadi responden terpilih.

### 3.5.2 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono (2019:52)

kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan melalui daftar pernyataan atau pertanyaan tertulis untuk diisi responden.

Adapun alat pengukuran penelitian ini adalah dengan *skala likert*. *Skala likert* merupakan model skala yang banyak digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Untuk memberikan peneliti terhadap jawaban kuesioner dibagi menjadi lima tingkat alternatif jawaban yang disusun pangkat dengan memberikan bobot (skor) 1-5 rincian sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS), pernyataan ini diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS), pernyataan ini diberi skor 2
3. Netral (N), pernyataan ini diberi skor 3
4. Setuju (S), pernyataan ini diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS), pernyataan ini diberi skor 5

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan analisis berganda untuk mengetahui bagaimana pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Penelitian ini menggunakan teknik uji regresi linier berganda dikarenakan memiliki variabel lebih dari satu. Model regresi berganda yang dikembangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Rumus :  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas pengolahan dana desa
$\alpha$	= Konstanta
X1	= Pemahaman perangkat desa
X2	= Peran perangkat desa
<i>e</i>	= <i>Error</i> item
$\beta_1, \beta_2$	= Koefisien regresi

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) mendefinisikan analisis statistik deskriptif sebagai analisis yang menyajikan data seperti yang dilihat dari rata-rata (*mean*), variabel, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewnees* kemencengan distribusi.

### 3.6.2 Uji Instrumen

#### a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52), mengatakan bahwa Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 5%) maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)

- b. Jika  $r < r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 5%) maka instrumen atau item item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

#### b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menurut Ghazali (2018:45) menunjukkan kuesioner cukup bisa dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah hasilnya konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Kuesioner yang tidak reliabel tidak bisa konsisten mengukur, sehingga hasil ukur tidak bisa dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel atau handal jika:

- a. Jika Nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )  $> 0,6$  maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah *reliabel*.
- b. Jika *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )  $< 0,6$  maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah tidak *reliabel*.

#### 3.6.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:163). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *uji Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil

perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:163).

#### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan yaitu untuk memberika kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pengujian asumsi klasik ini meliputi:

##### a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel *independen* yang nilai korelasi antar sesama variabel *independen* sama dengan nol (Ghozali, 2016:103). Dalam penelitian ini, multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). “Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  “. (Ghozali, 2016:103).

##### b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi dengan uji *Glejser*. Metode ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebasnya terhadap nilai absolut residual. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai absolut residual statistik di atas  $\alpha = 0,05$ .

### 3.6.5 Pengujian Hipotesis

#### a. Uji F (Uji Simultan)

Uji F-statistik menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang di masukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen atau variabel terikat Ghozali (2016:97). Jadi uji-F adalah untuk mengetahui variabel independen secara simultan atau anova (*analysis of variance*). Langkah-langkah dalam melakukan uji-F adalah sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis uji F :

- a.  $H_0 : \rho = 0$ , variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- b.  $H_1 : \rho \neq 0$ , variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

2. Tingkat signifikan  $\alpha$  yaitu 0,05 (5%) dengan tingkat kepercayaan 95%.

$$3. F \text{ hitung} = \frac{R^2(K-1)}{1-R^2/(N-K)}$$

Keterangan :

F : Nilai hitung

$R^2$  : Koefisien regresi berganda

K : Jumlah variabel bebas

N : Jumlah sampel

4. Kriteria hipotesis diterima jika :

a. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H_0$  dapat diterima dan  $H_1$  dapat ditolak. Oleh karena itu variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikansi  $F < 0,05$  maka  $H_0$  dapat ditolak dan  $H_1$  dapat diterima. Oleh karena itu variabel independen dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh variabel bebas yang diteliti  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel terikat  $Y$ . Menurut Sugiyono (2019:64) koefisien determinasi menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai responden yang dapat diterangkan atau akibat oleh hubungan linear dengan variabel independen. Nilai koefisien  $R^2$  nol dan satu, jika nilai  $R$  square berkisar hampir satu, berarti semakin kuat kemampuan variabel *independen* di dalam menjelaskan variabel *dependen* dan sebaliknya jika  $R$  Square semakin mendekati nol,

berarti semakin lemah kemampuan variabel *dependen* dalam menjelaskan variabel *dependen*.

**c. Uji t (Uji secara parsial)**

Uji-t ini bertujuan untuk menguji tingkat pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menjelaskan variabel dependen Ghozali (2016:98). Langkah-langkah pengujian uji t adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis uji t :
  - a.  $H_0 : \beta_i = 0$ , variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
  - b.  $H_1 : \beta_i \neq 0$ , variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Tingkat signifikansi  $\alpha$  adalah 0,05 (5%) dengan tingkat kepercayaan 95%.
3.  $t \text{ hitung} = \frac{\text{koefisien regresi}}{\text{standar error koefisien regresi}}$
4. Kriteria pengambilan keputusan :
  - a. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  dapat diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian variabel independen tidak dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
  - b. Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian variabel independen dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Pengambilan Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perangkat Desa di Desa Pudukittimur, Desa Pudukit Barat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang berjumlah 61 orang. Sesuai dengan metode sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yang dijadikan sampel pada penelitian ini berupa kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, kepala dusun, dan ketua RT/RW.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner yang ditujukan kepada responden untuk perangkat desa di Desa Pudukittimur, Desa Pudukit Barat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung dan responden diminta untuk menjawab item pernyataan pada kuesioner yang sudah disiapkan.

Adapun ringkasan penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Ringkasan Penyebaran Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	61
2	Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan	0
3	Jumlah kuesioner yang tidak bisa diolah	0
4	Jumlah kuesioner yang diolah	61

Sumber: data primer diolah tahun 2023

#### 4.1.2 Demografi Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada perangkat desa di Desa Pudakittimur, Desa PudakitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Berikut ini merupakan penjelasan dari karakteristik responden yang telah didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner, antara lain sebagai berikut :

##### a. Jenis Kelamin

Hasil pengisian kuesioner oleh responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Laki-Laki	78	70,49 %
2	Perempuan	19	29,51 %
Total		61	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Hasil dari penyebaran kuesioner mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang ada pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 61 responden, di ketahui responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki mengisi kuesioner penelitian sebanyak 43 dengan presentasinya sebesar 70,49%. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 18 dengan presentasi sebesar 29,51%. Dari tabel 4.2 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden mendapatkan hasil bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki menjadi mayoritas dalam pengisian kuesioner penelitian ini.

**b. Jabatan**

Hasil pengisian kuesioner oleh responden berdasarkan usia sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Kepala Desa	3	4,92 %
2	Sekretaris Desa	3	4,92 %
3	Kaur	10	16,39 %
4	Kasi	9	14,75 %
5	Kepala Dusun	13	21,31 %
6	BPD	23	37,70 %
Total		61	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Hasil dari penyebaran kuesioner mengenai karakteristik responden berdasarkan bagian pekerjaan yang ada pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 61 responden, diketahui pekerja sebagai kepala desa mengisi kuesioner penelitian sebanyak 3 dengan persentasenya sebesar 4,92%, sekretaris desa mengisi kuesioner penelitian sebanyak 3 dengan persentasenya sebesar 4,92%, kaur dan kasi mengisi kuesioner sebanyak 10 dan 9 responden dengan presentase 16,39% dan 14,75%, sedangkan kepala dusun mengisi kuesioner sebanyak 13 responden dengan presentase 21,31%, dan yang terakhir adalah BPD yang mengisi kuesioner penelitian sebanyak 23 dengan presentase sebanyak 37,70%.

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden mendapatkan hasil bahwa responden yang memiliki jabatan sebagian BPD memiliki presentase yang tinggi sebesar 37,70%.

### 4.1.3 Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum nilai rata-rata (*mean*), tertinggi (*max*), terendah (*min*), dan *standar deviasi* dari masing-masing variabel yaitu pemahaman perangkat desa ( $X_1$ ), peran perangkat desa ( $X_2$ ), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Mengenai hasil uji statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	61	1	5	4,26	,874
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	61	1	5	4,07	,929
Peran Perangkat Desa (X2)	61	2	5	4,21	,686
Valid N (listwise)	61				

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang di dapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) dari data tersebut bisa di deskriptifkan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maximum sebesar 5, nilai rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 4,26 dan standar deviasi data akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 0,874.
2. Variabel pemahaman perangkat desa ( $X_1$ ) dari data tersebut bisa di deskriptifkan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maximum

sebesar 5, nilai rata-rata pemahaman perangkat desa sebesar 4,26 dan standar deviasi data pemahaman perangkat desa adalah 0,929.

3. Variabel peran perangkat desa ( $X_2$ ) dari data tersebut bisa di deskriptifkan bahwa nilai minimum 2 sedangkan nilai maximum sebesar 5, nilai rata-rata peran perangkat desa sebesar 4,21 dan standar deviasi data peran perangkat desa adalah 0,686.

## 4.2 Pembahasan Penelitian

### 4.2.1 Uji Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas

Pada uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Adapun ketentuan pada uji validitas ini yaitu:

1. Jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka item pernyataan didalam kuesioner dikatakan valid.
2. Jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka item pernyataan didalam kuesioner dikatakan tidak valid.

Dalam uji validitas ini menggunakan nilai  $r$  tabel sebesar 0,252 dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 sedangkan patokan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 61 ( $df=N-2$ ). Berikut ini merupakan hasil ringkasan uji validitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5 Uji Validitas**

No	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel (5%)	Keterangan
1	Pemahaman Perangkat Desa (X1)	X <sub>1.1</sub>	0,670	0,252	Valid
		X <sub>1.2</sub>	0,724	0,252	Valid
		X <sub>1.3</sub>	0,848	0,252	Valid
		X <sub>1.4</sub>	0,824	0,252	Valid
2	Peran Perangkat Desa (X2)	X <sub>2.1</sub>	0,858	0,252	Valid
		X <sub>2.2</sub>	0,819	0,252	Valid
		X <sub>2.3</sub>	0,799	0,252	Valid
		X <sub>2.4</sub>	0,786	0,252	Valid
		X <sub>2.5</sub>	0,784	0,252	Valid
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y <sub>1.1</sub>	0,788	0,252	Valid
		Y <sub>1.2</sub>	0,676	0,252	Valid
		Y <sub>1.3</sub>	0,722	0,252	Valid
		Y <sub>1.4</sub>	0,705	0,252	Valid
		Y <sub>1.5</sub>	0,545	0,252	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Hasil pengujian variabel pemahaman perangkat desa memiliki nilai *pearson correlation* terendah 0,670 dan tertinggi 0,848. Dari r hitung terendah sampai r hitung tertinggi memiliki nilai lebih besar dari r tabel yaitu 0,252 dan tingkat signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa empat item pernyataan pada kuesioner variabel pemahaman perangkat desa dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai objek penelitian.

Hasil pengujian validitas variabel peran perangkat desa memiliki nilai *pearson correlation* terendah 0,784 dan tertinggi 0,858. dari r hitung terendah sampai r hitung tertinggi memiliki nilai lebih besar dari r tabel

yaitu 0,252 dan tingkat signifikansinya  $0,020 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa lima item pernyataan pada kuesioner variabel peran perangkat desa dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai objek penelitian.

Hasil pengujian validitas variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai *pearson correlation* terendah 0,545 dan tertinggi 0,788. Dari *r* hitung terendah sampai *r* hitung tertinggi memiliki nilai lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,252 dan tingkat signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa lima item pernyataan pada kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai objek penelitian.

#### b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kebenaran dan ketepatan alat ukur yang digunakan sehingga dapat dilihat seberapa tepatnya pengukuran relatif koefisien ketika dilakukannya pengukuran ulang. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabilitas jika jawaban seseorang pada pernyataan dinyatakan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas kuesioner pada penelitian ini untuk mengukur reliabilitasnya menggunakan nilai *cronbach alpha*.

**Tabel 4.6 Uji Reliabilitas**

Variabel	Instrumen	<i>Cronbach's Alpha</i>	Taraf <i>Cronbach's Alpha</i> > 0,60	Keterangan
X1	Pemahaman Perangkat Desa	0,765	0,60	Reliabel
X2	Peran Perangkat Desa	0,868	0,60	Reliabel
Y	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,721	0,60	Reliabel

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.6 menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan reliabel dan dipercaya sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai *Cronbach Alpha* mempunyai nilai lebih dari 0,6, dimana variabel pemahaman perangkat desa memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,765 > 0,6, variabel peran perangkat desa memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,868 > 0,6, dan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,721 > 0,6 maka data reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.2.2 Uji Normalitas

Pada uji normalitas ini peneliti menggunakan uji *kormogrov-smirnov*, dalam pengujian tersebut apabila nilai sig. < 0,05 maka data dalam pengujian tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig. > 0,05 maka data dalam pengujian tersebut berdistribusi secara normal. Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini:



**Tabel 4.7 Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pemahaman Perangkat Desa (X1)	Peran Perangkat Desa (X2)
N		61	61	61
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	21,31	16,23	21,10
	Std. Deviation	2,724	2,759	2,773
	Most Extreme Differences			
	Absolute	,143	,100	,133
	Positive	,119	,086	,080
	Negative	-,143	-,100	-,133
Test Statistic		,143	,100	,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,059 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.7 data yang diolah menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) nilai *Kolmogorov Smirnov Test* sebesar 0,143 dan nilai *Asymp.Sig* 0,063 > Probabilitas alpha (0,05) maka data akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan berdistribusi normal.
2. Pemahaman perangkat desa (X1) menghasilkan nilai *Kolmogorov Smirnov Test* sebesar 0,100 dan nilai *Asymp.Sig* 0,200 > Probabilitas alpha (0,05) maka data pemahaman perangkat desa (X1) dinyatakan berdistribusi normal.

3. Peran perangkat desa ( $X_2$ ) menghasilkan nilai *Kolmogorov Smirnov Test* sebesar 0,133 dan nilai *Asymp.Sig* 0,059 > Probabilitas alpha (0,05) maka data peran perangkat desa ( $X_2$ ) dinyatakan berdistribusi normal.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinieritas

Ketentuan pada uji multikoleniaritas ini jika nilai *tolerance* < 0,1 dan jika *VIF* > 10, maka tidak jika multikoleniaritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini merupakan hasil uji multikoleniaritas pada penelitian ini:

**Tabel 4.8 Uji Multikoleniaritas**

Variabel Independen	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>VIF</i>	Keterangan
Pemahaman Perangkat Desa ( $X_1$ )	0,512	1,952	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Peran Perangkat Desa ( $X_2$ )	0,512	1,952	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 4.8 bahwa hasil uji multikoleniaritas menghasilkan bahwa tidak terdapat adanya hubungan linier antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Hal tersebut bisa dilihat dengan cara mengetahui ketentuan pada uji multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10, serta nilai *VIF* < 10. Adapun nilai *VIF* yang diperoleh pada multikolinieritas disetiap variabel independen (bebas) sebagai berikut:

1. Pemahaman perangkat desa memiliki nilai *VIF* sebesar 1,952 yang artinya nilai *VIF* pemahaman perangkat desa sebesar  $1,952 < 10$ .
2. Peran perangkat desa memiliki nilai *VIF* sebesar 1,952 yang artinya nilai *VIF* peran perangkat desa sebesar  $1,952 < 10$ .

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas antar variabel bebas terbukti adanya setiap nilai VIF dari masing-masing variabel independen  $< 10$ , dengan demikian asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi. Sedangkan nilai *tolerance* yang diperoleh pada uji multikoleniaritas anatar lain:

1. Nilai *tolerance* yang dihasilkan pada variabel pemahaman perangkat desa sebesar 0,512.
2. Nilai *tolerance* yang dihasilkan pada variabel peran perangkat desa sebesar 0,512.

Menurut hasil dari nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka tidak terjadinya multikolinieritas.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, yang memiliki ketentuan jika nilai signifikasi pada masing-masing variabel  $> 0,05$  atau 5% maka variabel-variabel pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas**

Variabel Independen	t	Nilai Signifikasi	Keterangan
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	-1,728	0,381	Terbebas dari Heteroskadastisitas

Peran Perangkat Desa (X <sub>2</sub> )	-,581	0,364	Terbebas dari Heteroskedastisitas
--	-------	-------	-----------------------------------

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* pada tabel 4.9 dapat dijelaskan nilai signifikan yang diperoleh pada variabel independen. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut:

1. Pada variabel pemahaman perangkat desa (X<sub>1</sub>) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,089.
2. Pada variabel peran perangkat desa (X<sub>2</sub>) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,564.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas memperoleh nilai signifikan disetiap variabel independen lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka dari itu hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian tersebut.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil dari uji analisis regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
				Sig.

1 (Constant)	6,958	1,645		4,230	,000
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	,664	,108	,673	6,148	,000
Peran Perangkat Desa (X2)	,170	,107	,173	2,579	,020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 4.10 menghasilkan persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini antara lain:

$$Y = 6,077 + 0,664X_1 + 0,170X_2 + e$$

(Sig.0.000)      (Sig.0.020)

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X<sub>1</sub> : Pemahaman Perangkat Desa
- X<sub>2</sub> : Peran Perangkat Desa
- e : Error item

#### 4.2.5 Uji Hipotesis

##### a. Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen antara lain pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa memiliki pengaruh secara simultan pada variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 4.11 Uji F (Simultan)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	286,816	2	143,408	52,555	,000 <sup>b</sup>

Residual	158,266	58	2,729		
Total	445,082	60			

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)  
 b. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X2), Pemahaman Perangkat Desa (X1)

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji F dapat dijelaskan bahwa nilai F sebesar 52.555 dengan nilai Sig sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### b. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Pada uji ini yang menunjukkan seberapa besar model regresi menjelaskan mengenai variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai pada koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Artinya ketika nilai  $R^2$  mendekati 1 maka semakin baik model regresi. Sedangkan ketika nilai  $R^2$  mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen pada penelitian.

**Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,803 <sup>a</sup>	,644	,632	1,652

- a. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X2),  
 Pemahaman Perangkat Desa (X1)

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan dari hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 4.12 memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,632. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini yang meliputi

pemahaman perangkat desa ( $X_1$ ) dan peran perangkat desa ( $X_2$ ) dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) sebesar 63,2%, sedangkan sisanya 36,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

**c. Uji t (Parsial)**

Pada hasil pengujian ini melihat bahwa ada tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara individu. Berikut ini adalah hasil dari uji t sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6,958	1,645		4,230	,000
Pemahaman Perangkat Desa ( $X_1$ )	,664	,108	,673	6,148	,000
Peran Perangkat Desa ( $X_2$ )	,170	,107	,173	2,579	,020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( $Y$ )  
Sumber: data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.13 memperoleh hasil disetiap variabel independen adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pemahaman perangkat desa ( $X_1$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  diperoleh sebesar 6,148 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{1a}$  diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dilihat dari segi jawaban pada responden perangkat desa di Desa Pudakittimur, Desa PudakitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dari ke empat item pernyataan yang diberikan semua jawaban mendominasi “setuju” yang artinya pemahaman perangkat desa akan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pudakittimur, Desa PudakitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah sangat baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rahmadhani dan Syahdan (2022) bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pemahaman perangkat desa yang baik terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, berkualitas dan transparan. Sedangkan yang menolak penelitian dari Setiawan dan Yuliani (2017) dan Purba (2020) bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh pemahaman perangkat desa tentang UU No 20 Tahun 2018, serta akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab perangkat desa tanpa mempertimbangkan pemahaman tentang UU No 20 Tahun 2018. Selanjutnya penelitian Purba (2020) bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



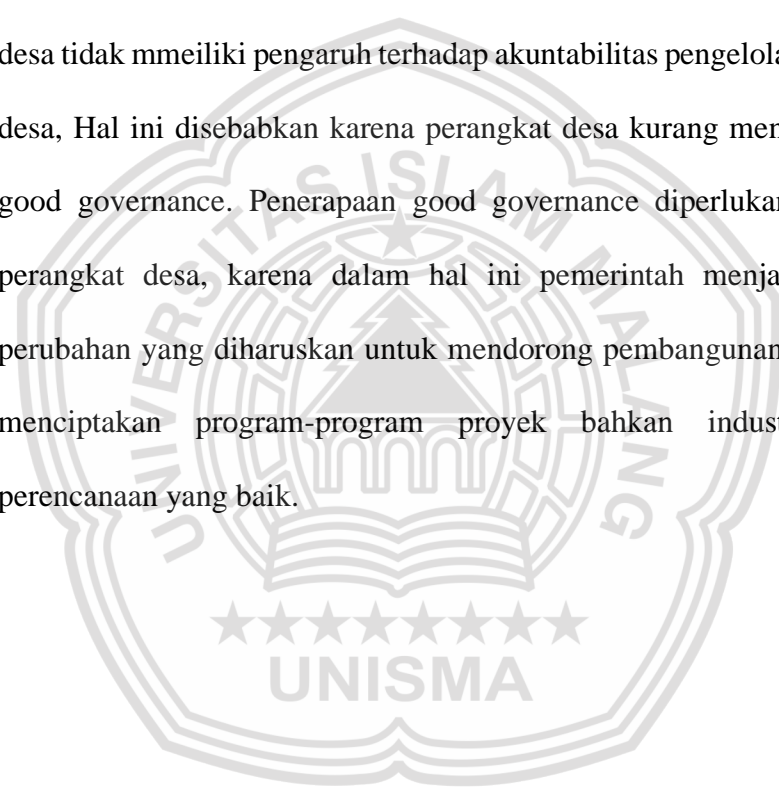
## 2. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t pada variabel peran perangkat desa ( $X_2$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  diperoleh sebesar 2,579 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{1b}$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dilihat dari distribusi atas jawaban responden pada pernyataan “saya terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa” dan “saya ikut serta dalam menyusun rincian anggaran biaya desa” hampir semua responden “setuju” dengan kedua item pernyataan tersebut yang artinya perangkat desa sudah baik dalam membantu perencanaan penggunaan dana desa dan penyusunan rincian anggaran dana desa juga sudah diikuti oleh perangkat desa dengan baik .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Setiawan dan Yuliani (2017) dan Rangkuti dan Novasari (2019) bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya bahwa dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan, ditambah lagi kedudukan perangkat desa membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, jenis kedudukan dan pengelolaan desa. Sejalan Rahmadhani dan Syahdan (2022) bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dengan akuntabilitas

pengelolaan dana desa, hal ini berarti perangkat desa telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan demikian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah sesuai anjuran yang ada, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa. Sedangkan penelitian yang menolak Ningsih et al (2022) bahwa peran perangkat desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Hal ini disebabkan karena perangkat desa kurang menerapkan good governance. Penerapan good governance diperlukan dalam perangkat desa, karena dalam hal ini pemerintah menjadi agen perubahan yang diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program proyek bahkan industri dan perencanaan yang baik.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa studi kasus pada desa di kecamatan sangkapura kabupaten gresik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian dan analisis hipotesis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa perangkat desa di Desa Pudukittimur, Desa PudukitBarat, dan Desa Suwari kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
2. Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya pendidikan yang tinggi dapat membantu perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dengan baik, dengan adanya kegiatan rutin pelatihan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa dapat membantu perangkat desa dalam meningkatkan pemahaman perangkat desa, serta pengalaman kerja yang tinggi dapat membantu perangkat desa dalam pekerjaannya.
3. Peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya perangkat desa di Desa Pudukittimur, Desa PudukitBarat, dan Desa Suwari kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik sudah terlibat dan ikutserta dalam perencanaan, pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, penatausahaan, serta penyusunan rincian anggaran biaya desa.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini telah di upayakan secara optimal, meskipun demikian dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya memiliki 2 variabel independen yaitu pemahaman perangkat desa ,peran perangkat desa dan 1 variabel dependen yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan melakukan penyebaran koesioner sehingga responden bisa saja memberikan jawaban yang kurang teliti dalam mengisi data yang diperoleh.
3. Objek penelitian terbatas hanya dilakukan di Desa Pudakittimur, Desa Pudakit Barat, Desa Suwari.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan saran pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain seperti Penerapan Alokasi Dana Desa (Ramadhani dan Syahdan, 2022), Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (Ningsih et al 2022).
2. Bagi peneliti selanjutnya pada saat pengambilan sampel disarankan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi kepada responden,

dengan melakukan wawancara dan dokumentasi peneliti akan mendapatkan informasi dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian contohnya seperti se-kabupaten Gresik atau se-provinsi jawa timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Elliyana, N., Diana, N., & Junaidi, J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa pekalongan dan desa sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(10).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka, Jawa Timur.
- HARDININGSIH, P., Udin, U. D. I. N., MASDJOJO, G. N., & SRIMINDARTI, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability?. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223-233.
- Hoesada, Jan. 2014. *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <https://gresikkab.go.id/home>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- KBBI. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014)*.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). *Analysis of Factors Affecting Accountability in Village Fund Management in Central Lombok District*. 30 (Juli), 1886–1899.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

- Mahsun, Sulistyowati, F., Purwanugraha, H.A. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Ndraha, T. (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, U. S., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021 (Studi Pada 8 Desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, 1 (2014) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia).
- Purba, S. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 10-19.
- Rahmadhani, A., & Syahdan, S. A. (2022, September). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa Dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru. In *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC* (Vol. 1, No. 1).
- Rangkuti, L. E., & Novasari, D. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). *Wahana inovasi: jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat UISU*, 8(2), 184-187.
- Selvia, M. S. (2020). Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-210.
- Setiyono, B. 2014. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiono, 2017. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2018. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2019. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10 (1), 105–112.





# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Malang, saya :

Nama : Masriyah

NPM : 21901082058

Jurusan/Smt : Akuntansi/8

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik)”**. Untuk ini, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data peneliti yang di peroleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/I tinggal, sehingga kerahasiannya akan saya jaga dengan etika penelitian.

Saya mengucapkan Terima kasih Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktunya untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Masriyah

**KUESIONER PENGARUH PEMAHAMAN PERANGKAT DESA DAN  
 PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS  
 PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik)**

Nama : .....

**Berilah tanda ( √ ) untuk setiap pernyataan ini sesuai data diri anda**

**Jenis Kelamin :**

- Laki-Laki  
 Perempuan

**Jabatan :**

- Kepala Desa  
 Sekretaris Desa  
 Kaur  
 Kasi  
 BPD

**Keterangan Cara Pengisian :**

Berilah tanda ( √ ) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan terhadap pelayanan yang anda terima dengan pilihan sebagai berikut :

- 1. Sangat Tidak Setuju    2. Tidak Setuju    3. Netral    4. Setuju    5. Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		1	2	3	4	5
<b>Pemahaman Perangkat Desa</b>						
1	Pendidikan yang tinggi dapat membantu perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang baik					
2	Adanya kegiatan rutin mengenai pelatihan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa dengan harapan pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa					
3	Pekerjaan selaku perangkat desa yang membutuhkan tanggungjawab yang tinggi,					

	sehingga pelatihan mengenai pengelolaan dana desa dinilai penting					
4	Pengalaman kerja yang tinggi dapat membantu perangkat desa dalam pekerjaannya					
<b>Peran Perangkat Desa</b>						
1	Saya terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa					
2	Saya terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa					
3	Saya terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan alokasi dana desa					
4	Saya melaksanakan pekerjaan terkait dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah					
5	Saya ikut serta dalam menyusun rincian anggaran biaya desa					
<b>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>						
1	Perencanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa					
2	Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya					
3	Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa					
4	Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota					
5	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran					

## Lampiran 2. Tabulasi

### a. Pemahaman Perangkat Desa (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
4	5	3	3	15
5	3	4	4	16
4	3	2	3	12
2	4	4	4	14
4	5	4	3	16
5	5	4	4	18
5	5	4	5	19
2	3	2	2	9
5	5	5	5	20
3	3	2	2	10
4	4	4	4	16
4	4	3	3	14
5	5	5	5	20
5	5	3	2	15
4	4	3	4	15
5	5	2	3	15
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
4	3	3	3	13
4	5	3	4	16
4	4	5	5	18
3	4	4	4	15
3	4	3	3	13
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	3	18
4	5	3	3	15
4	4	4	5	17
5	5	5	5	20
4	4	2	3	13
4	4	3	2	13
4	4	1	1	10
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
4	4	4	5	17
5	4	4	5	18
4	5	5	3	17

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
4	5	4	5	18
4	5	5	5	19
5	5	4	4	18
5	5	5	5	20
5	4	3	3	15
4	4	4	4	16
4	5	4	5	18
4	5	5	2	16
2	4	4	4	14
4	4	3	4	15
5	4	3	3	15
5	5	3	5	18
5	5	5	5	20
4	3	2	3	12
4	5	4	3	16
4	4	3	3	14
3	3	3	3	12
5	5	3	4	17
5	4	4	4	17
4	4	5	5	18

**b. Peran Perangkat Desa (X2)**

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
4	4	3	4	4	19
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
3	5	4	5	4	21
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
2	3	3	3	3	14
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	3	16
4	4	5	4	4	21
4	2	4	4	5	19
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	22

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
4	4	4	5	5	22
3	3	4	3	3	16
4	4	3	3	4	18
3	3	3	4	4	17
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	3	22
4	4	4	5	4	21
4	4	5	4	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	21
4	5	4	5	4	22
4	3	3	4	4	18
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	4	22
5	5	4	5	4	23
4	5	4	5	5	23
5	4	4	4	5	22
4	4	5	5	4	22
5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	3	5	5	23
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	3	17
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	4	3	5	4	19
4	4	5	4	4	21
3	3	3	4	4	17
3	3	3	4	3	16
4	4	5	5	5	23
5	5	4	4	5	23
4	4	5	5	5	23

**c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
5	4	4	4	5	22
5	5	5	4	4	23
4	5	4	4	5	22
5	4	3	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	2	4	5	4	19
4	4	5	5	3	21
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	5	23
2	3	2	2	5	14
5	5	5	5	5	25
2	3	3	3	4	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	4	4	23
4	5	5	4	3	21
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	4	22
5	5	3	3	5	21
4	4	3	4	3	18
5	4	4	5	3	21
4	3	3	3	3	16
3	4	4	3	3	17
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
5	4	3	5	5	22
5	4	3	4	5	21
4	5	4	5	5	23
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
3	5	3	4	2	17
4	4	4	3	4	19
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	4	21
4	5	3	4	5	21
4	3	5	3	5	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	4	4	23
5	4	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25



Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	3	5	4	5	21
5	5	4	3	4	21
4	4	1	4	3	16
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	5	21
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	22
4	4	3	5	5	21
4	4	4	3	5	20
3	3	3	4	5	18
3	3	5	3	5	19
2	4	4	5	4	19
5	5	4	5	5	24

### Lampiran 3. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	61	1	5	4,26	,874
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	61	1	5	4,07	,929
Peran Perangkat Desa (X2)	61	2	5	4,21	,686
Valid N (listwise)	61				

### Lampiran 4. Uji Validitas

#### a. Pemahaman Perangkat Desa (X1)

		Correlations				Pemahaman Perangkat Desa (X1)
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
X1.1	Pearson Correlation	1	,528**	,321*	,355**	,670**

	Sig. (2-tailed)		,000	,012	,005	,000
	N	61	61	61	61	61
X1.2	Pearson Correlation	,528**	1	,497**	,367**	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,004	,000
	N	61	61	61	61	61
X1.3	Pearson Correlation	,321*	,497**	1	,677**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,012	,000		,000	,000
	N	61	61	61	61	61
X1.4	Pearson Correlation	,355**	,367**	,677**	1	,824**
	Sig. (2-tailed)	,005	,004	,000		,000
	N	61	61	61	61	61
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	Pearson Correlation	,670**	,724**	,848**	,824**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	61	61	61	61	61

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### b. Peran Perangkat Desa (X2)

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Peran Perangkat Desa (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	,719**	,612**	,520**	,608**	,858**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	61	61	61	61	61	61
X2.2	Pearson Correlation	,719**	1	,514**	,604**	,453**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	61	61	61	61	61	61
X2.3	Pearson Correlation	,612**	,514**	1	,523**	,570**	,799**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	61	61	61	61	61	61

X2.4	Pearson Correlation	,520**	,604**	,523**	1	,564**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	61	61	61	61	61	61
X2.5	Pearson Correlation	,608**	,453**	,570**	,564**	1	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	61	61	61	61	61	61
Peran Perangkat Desa (X2)	Pearson Correlation	,858**	,819**	,799**	,786**	,784**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	61	61	61	61	61	61

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

		Correlations					Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
Y.1	Pearson Correlation	1	,530**	,417**	,456**	,308*	,788**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,016	,000
	N	61	61	61	61	61	61
Y.2	Pearson Correlation	,530**	1	,319*	,399**	,119	,676**
	Sig. (2-tailed)	,000		,012	,001	,360	,000
	N	61	61	61	61	61	61
Y.3	Pearson Correlation	,417**	,319*	1	,398**	,261*	,722**
	Sig. (2-tailed)	,001	,012		,002	,042	,000
	N	61	61	61	61	61	61
Y.4	Pearson Correlation	,456**	,399**	,398**	1	,201	,705**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002		,121	,000

	N	61	61	61	61	61	61
Y.5	Pearson Correlation	,308*	,119	,261*	,201	1	,545**
	Sig. (2-tailed)	,016	,360	,042	,121		,000
	N	61	61	61	61	61	61
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pearson Correlation	,788**	,676**	,722**	,705**	,545**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	61	61	61	61	61	61

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 5. Uji Reabilitas

#### a. Pemahaman Perangkat Desa (X1)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,765	4

#### b. Peran Perangkat Desa (X2)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,868	5

#### c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,721	5

## Lampiran 6. Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pemahaman Perangkat Desa (X1)	Peran Perangkat Desa (X2)
N		61	61	61
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	21,31	16,23	21,10
	Std. Deviation	2,724	2,759	2,773
	Most Extreme Differences			
	Absolute	,143	,100	,133
	Positive	,119	,086	,080
	Negative	-,143	-,100	-,133
Test Statistic		,143	,100	,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,059 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran 7. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t				
1 (Constant)	6,958	1,645		4,230	,000			
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	,664	,108	,673	6,148	,000	,512	1,952	
Peran Perangkat Desa (X2)	,170	,107	,173	2,579	,120	,512	1,952	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

### Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	3,792	,962		3,942	,000
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	-,109	,063	-,294	-	,089
Peran Perangkat Desa (X2)	-,036	,063	-,099	-,581	,564

a. Dependent Variable: RES2

### Lampiran 9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	6,958	1,645		4,230	,000
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	,664	,108	,673	6,148	,000
Peran Perangkat Desa (X2)	,170	,107	,173	2,579	,020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

### Lampiran 10. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	286,816	2	143,408	52,555	,000 <sup>b</sup>
	Residual	158,266	58	2,729		
	Total	445,082	60			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X2), Pemahaman Perangkat Desa (X1)

**Lampiran 11. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,803 <sup>a</sup>	,644	,632	1,652

a. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X2),  
Pemahaman Perangkat Desa (X1)

**Lampiran 12. Uji t (Parsial)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	6,958	1,645		4,230	,000
Pemahaman Perangkat Desa (X1)	,664	,108	,673	6,148	,000
Peran Perangkat Desa (X2)	,170	,107	,173	2,579	,020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)



## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2010). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis.
- Elliyana, N., Diana, N., & Junaidi, J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa pekalongan dan desa sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(10).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka, Jawa Timur.
- HARDININGSIH, P., Udin, U. D. I. N., MASDJOJO, G. N., & SRIMINDARTI, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability?. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223-233.
- Hoesada, Jan. 2014. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <https://gresikkab.go.id/home>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- KBBI. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). *Analysis of Factors Affecting Accountability in Village Fund Management in Central Lombok District*. 30 (Juli), 1886–1899.
- Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.



- Mahsun, Sulistyowati, F., Purwanugraha, H.A. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Ndraha, T. (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, U. S., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021 (Studi Pada 8 Desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, 1 (2014) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia).
- Purba, S. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 10-19.
- Rahmadhani, A., & Syahdan, S. A. (2022, September). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa Dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru. In *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC* (Vol. 1, No. 1).
- Rangkuti, L. E., & Novasari, D. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). *Wahana inovasi: jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat UISU*, 8(2), 184-187.
- Selvia, M. S. (2020). Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-210.
- Setiyono, B. 2014. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiono, 2017. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2018. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2019. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yesinia, N. I., Yulianti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10 (1), 105–112.